

TERKAIT PENONAKTIFAN 243 PTS Sebagian Memang Tidak Aktif

JAKARTA (KR) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir membenarkan sebanyak 243 perguruan tinggi swasta dinonaktifkan. "Itu semua sudah diumumkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Kebanyakan di Kopertis 12. Jenis pelanggaran kampus nonaktif antara lain adanya masalah laporan akademik, nisbah dosen dan mahasiswa, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan, kata Mohammad Nasir di Jakarta, Sabtu (3/10), dalam pesan pendek kepada *KR*.

Menanggapi kecemasan mahasiswa yang status kampusnya nonaktif, Sekjen Kemenristek Dikti, Ainun Naim mengatakan, pihak Dikti maupun Kopertis akan mencari solusi bersama dengan pihak yayasan. "Kami akan minta yayasan untuk memenuhi kewajibannya, karena di awal pembukaan kampus, mereka memiliki janji akan melayani masyarakat dengan kualitas yang sesuai standar. Opsi terakhir yang akan dilakukan Kemenristek Dikti adalah meminta kampus merelokasi belajar mahasiswa, jika memang tidak dapat memperbaiki statusnya," tandasnya.

Pihaknya minta 243 PTS yang dinyatakan nonaktif itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan mahasiswa. Kegiatan perkuliahan harus tetap berjalan di kampus yang nonaktif, agar tidak merugikan para mahasiswa. "Jika mereka (kampus yang dinyatakan nonaktif, red) tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan, kami minta mahasiswa dipindahkan ke perguruan tinggi lain yang tidak bermasalah," tegas Ainun.

Terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir mengatakan, dari 243 PTS yang dinonaktifkan,

* Bersambung hal 10 kol 4

Sebagian Sambungan hal 1

terdapat tiga Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Ketiga PTM tersebut adalah STIE Muhammadiyah Cilacap, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Karawang dan Stiekes Muhammadiyah Sidrap Sulawesi Selatan. "Khusus STTM Karawang, sudah lama tidak beroperasi dan sudah lama pula tidak ada proses belajar mengajar," jelasnya, Sabtu (3/10) usai kuliah umum di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Menurut Haedar, penutupan ketiga PTM tersebut oleh pemerintah tidak ada kaitan dengan masalah jual-beli ijazah. Hal itu terjadi karena keterbatasan dosen atau pengajar dan ada keterlambatan melengkapi administrasi sesuai dengan aturan dari pemerintah. "Saya tegaskan, Muhammadiyah tidak jual-beli ijazah *abal-abal*. Kalau itu terjadi, PP Muhammadiyah sudah menutup lama perguruan tinggi tersebut," tandasnya.

Sementara itu Koordinator Kopertis Wilayah V, Dr Bambang Supriyadi CES DEA mengungkapkan, tujuh PTS di DIY yang dinyatakan bermasalah (berstatus nonaktif), sebenarnya sudah lama tidak aktif. Karena itu masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, karena memang tidak ada aktivitas perkuliahan di tujuh kampus tersebut.

Menurut Bambang, setelah UPN Veteran, Yogyakarta dinegerikan, saat ini jumlah PTS yang aktif dan berada di bawah Kopertis Wilayah V hanya 106 PTS. Mengingat tujuh PTS yang masuk dalam daftar PT bermasalah dari Kemenristek Dikti tersebut sudah lama tidak aktif, secara otomatis tidak membutuhkan